GAGASAN HUKUM

Volume 1 | Nomor 1 | Juni 2019 | Halaman 1-120

**KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI
KEJAHATAN KEMANUSIAAN**

Hanafi Arief

**MENJERAT PELAKU PENYURUH PENGUSAKAN BARANG MILIK ORANG LAIN
DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASAS FUNGSI SOSIAL**

Laurensius Arliman S

**KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGURANGAN PENGGUNAAN
KANTONG PLASTIK DI WILAYAH KOTA BOGOR**

Nazaruddin Lathif

**PENCANTUMAN KOMPOSISI BAHAN PADA LABEL MAKANAN SEBAGAI
HAK HUKUM DI KOTA PEKANBARU**

Riantika Pratiwi

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
DI KABUPATEN KAMPAR**

Tri Novita Sari Manihuruk

**PORNOGRAFI DUNIA MAYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,
UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI ELEKTRONIK**

Vera Rimbawani Sushanty

**PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK
BERSUBSIDI DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
MINYAK DAN GAS BUMI**

Zulkifli

**MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LANCAANG KUNING**

DAFTAR ISI

HANAFI ARIEF

*Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Kejahatan
Kemanusiaan.....* 1-16

LAURENSIUS ARLIMAN S.

*Menjerat Pelaku Penyruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan
Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial* 17-40

NAZARUDDIN LATHIF

*Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan Penggunaan Kantong
Plastik Di Wilayah Kota Bogor* 41-62

RIANTIKA PRATIWI

*Pencantuman Komposisi Bahan Pada Label Makanan Sebagai Hak Hukum Di
Kota Pekanbaru* 63-87

TRI NOVITA SARI MANIHURUK

*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kampar
.....* 88-108

VERA RIMBAWANI SUSHANTY

*Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-
Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Elektronik.....* 109-129

ZULKIFLI

*Penegakan Hukum Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak
Bersubsidi Di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Minyak Dan Gas Bumi
.....* 130-145

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN KAMPAR

Tri Novita Sari Manihuruk

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

trinovitasarimanihuruk93@gmail.com

Info Artikel:

Diterima:

| Disetujui:

| Dipublikasikan:

Abstrak

Tingginya Korupsi Dana Desa di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Kampar menjadi problem saat ini. Idealnya penggunaan dana desa haruslah digunakan secara optimal untuk pembangunan Desa. Untuk mengantisipasi agar korupsi dana desa di Kabupaten Kampar tidak terus berkembang, sangatlah tergantung bagaimana pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kampar, hambatan dan upaya penegakan hukumnya. Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum sosilogis dengan memperoleh data langsung ke lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan penegakan hukum korupsi dana desa oleh penegak hukum bersifat represif. Hambatan yang terjadi disebabkan penegakan hukum belum profesional karena masih bertindak represif, sulitnya menghadirkan saksi, dan terpidana tidak memiliki harta untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara. Upaya yang harus dilakukan adalah: Penegak hukum harus bertindak secara preemtif dan preventif, Asetracing (penelusuran asset). Kesimpulan penelitian ini ialah penegakan hukum korupsi dana desa belum maksimal karena masih bersifat represif.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Dana Desa

CORRUPTION CRIMINAL LAW ENFORCEMENT VILLAGE FUNDS IN KAMPAR DISTRICT

Abstract

The height corruption of Village Funds in Riau Province, especially in the Kampar Regency is a problem now. Ideally, the use of village funds should be used optimally for village development. To anticipate that the corruption of village funds in Kampar Regency does not continue to grow, it depends on how the enforcement of the law itself. The aim of the research to analyze the law enforcement of corruption village funds in Kampar District, analyze the obstacles and efforts to enforce the law of corruption in village funds in Kampar District. This research method is sociologist legal research by obtaining data directly to the field by conducting observations and interviews. The results of the research showing that law enforcement of village fund corruption in Kampar Regency by law enforcers is repressive. The obstacles faced by law enforcers include: law enforcement is not professional because of law enforcement still repressive, The difficulty of presenting witnesses; The convicted person does not have the property to pay money to compensate the State for finances. Efforts must be made as follows: Law enforcers must act pre-emptively and preventively, Asetracing (tracking assets). This research concludes that law enforcement of village fund corruption has not been maximized because it is still repressive

Keywords: Law enforcement, corruption, village funds

A. PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan salah satu sumber Keuangan Desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa, maka dibentuklah peraturan khusus tentang dana Desa yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bahwa regulasi tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN antara lain dimaksudkan agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa dengan

memperbaiki tahapan penyaluran Dana Desa. Percepatan penyaluran Dana Desa ke Desa, harus tetap memperhatikan aspek akuntabilitas.

Berdasarkan regulasi tersebut, idealnya Pengelolaan dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera akan menjadikan Negara kuat dan mampu bersaing dengan Negara-negara yang lain. Kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup yang semakin berkualitas, oleh karena itu kesejahteraan merupakan nilai utama yang selalu diupayakan untuk dapat diwujudkan oleh setiap manusia. Dana desa merupakan salah satu factor yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan.¹

Mengingat dana desa saat ini peruntukannya difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat, ternyata dalam implementasi terhadap pengelolaan dana desa banyak terjadi praktik korupsi. Baik sengaja ataupun tidak disengaja (karena kurangpahaman cara pemanfaatan maupun pelaporan administratifnya) oleh perangkat desa dan siapa pun yang berkaitan dengan penggunaan dana desa.²

¹Endah Dwi Winarni, "Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Dana Desas Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten

Pati)", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret 2018, hlm. 16.

²Bunga, Marten, Aan Aswari dan Hardianto Djangih, "Konsepsi Penyelamatan Dana

Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa dana-dana menganggur (*idle fund*) yang dimiliki oleh pemerintah daerah sering menjadi modus korupsi oleh pejabat di daerah. Modus korupsi ini merupakan kasus kedua yang terjadi di Indonesia yaitu terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara di Tahun 2010 dan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh di Tahun Anggaran 2009.³

Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat bahwa korupsi di desa, utamanya yang menyangkut anggaran desa, merupakan salah satu problem mendasar. Problem ini lahir karena pengelolaan anggaran yang besar namun implementasinya di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa. ICW telah melakukan pemantauan atas korupsi yang terjadi di desa. Hasil pemantauan ICW, pada tahun 2015 – 2017 kasus tindak pidana korupsi di desa semakin meningkat. Pada tahun 2015, kasus korupsi mencapai 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada tahun 2016. Lonjakan lebih dari dua

kali lipat kemudian terjadi pada tahun 2017 dengan 96 kasus. Total kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 154 kasus.⁴

Tata kelola dana desa belum sepenuhnya bebas dari korupsi. Dana desa dijadikan sebagai sasaran korupsi bagi Tersangka. Sejak bergulir tahun 2015 hingga saat ini, dana desa yang sudah digelontorkan pemerintah berjumlah Rp 186 triliun. Dana ini sudah disalurkan ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia. Dalam perkembangannya, dana desa yang berlimpah tersebut rawan praktik korupsi. Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar.⁵ Tercatat, ada 17 kasus pada tahun 2015. Pada tahun kedua, jumlahnya meningkat menjadi 41 kasus. Sementara, pada 2017, korupsi dana desa melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 96 kasus. Sementara pada semester I tahun 2018, terdapat 27 kasus di desa yang semuanya menjadikan anggaran desa

Desa dari Perbuatan Korupsi”, *Jurnal Holrev Faculty of Law*, Vol. 2, Nomor 2, 2018, hlm. 449-459.

³Fathur Rahman, “Korupsi di Tingkat Desa”, *Jurnal Governance*, Vol. 2, Nomor 1, November 2011, hlm. 16.

⁴Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti, “Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan

Dana Desa” *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, Vol. 6, No. 3, Desember 2018.

⁵Ihsanudin, ICW: *Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all>, diakses tanggal 21 Juni 2019.

sebagai objek korupsi. Dari segi pelaku, kepala desa menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi dana desa. Pada 2015, 15 kepala desa menjadi tersangka; 2016 jumlahnya meningkat menjadi 32 kepala desa, dan jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 65 orang pada 2017.⁶

Fakta dilapangan menunjukkan tingginya kasus korupsi dana desa di Provinsi Riau. Bahwa berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Pangucap Priyo, SIK selaku Kasubdit Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau (POLDA RIAU) mengatakan

bahwa ada beberapa kasus korupsi dana desa yang terjadi di Provinsi Riau diantaranya Kabupaten Kampar, Rokan Hilir, Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sementara khusus di Kabupaten Kampar, tercatat sedikitnya ada 3 kasus korupsi dana desa dengan 3 Tersangka. Berikut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa di
Kabupaten Kampar

No	Kasus	Thn	Pelaku	Kerugian keuangan Negara
1	Desa Kampung Panjang, Desa Sungai Jalau, Desa Muara Jalai dan Desa Sungai Tonang Kecamtn Kampar	2016	Kepala Desa	274.959.700
2	Desa Gunung Malelo, Kecamatan Koto Kampar Hulu)	2016	Kepala Desa	335.963.575.70
3	Tapung Hilir (Zul Anizal)	2016	Kepala Desa	90.000.000,00
Jumlah 3				

Sumber: Data Olahan dari Polda Riau, Polres Kampar, Kejaksaan Negeri Bangkinang Maret Tahun 2019

Bahwa berdasarkan tabel tersebut, diketahui jumlah korupsi dana desa di Kabupaten Kampar tercatat sedikitnya ada

3 kasus dengan 3 Tersangka, dengan nilai kerugian keuangan Negara yang berbeda-beda. Dimana pada desa tersebut memang benar ditemukan adanya kasus korupsi dana desa. Yang dalam penegakan hukumnya

⁶*Ibid.*

juga ditemukan beberapa perbedaan sesuai dengan motif masing-masing kasus tersebut. Untuk mengantisipasi agar korupsi dana desa di Kabupaten Kampar tidak terus berkembang, sangatlah tergantung bagaimana pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara.⁷

Beragam permasalahan di atas, memunculkan pertanyaan bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kampar, apa saja hambatan nya dan bagaimana upaya penegakan hukumnya.

B. METODE PENELITIAN

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), di mana yang dimaksud dengan penelitian hukum

sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kampar.

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah : 1) Data primer adalah data utama yang diperoleh peneliti melalui responden atau sampel, data ini dapat berasal dari Hakim Tipikor, Polres Kampar, Kejari Bangkinang; 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok permasalahan yang dibahas. Data sekunder dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah, seminar, brosur, dan lainnya.

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum, yaitu 1) Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

⁷Achmad Surya, "Problematisa Penyidik Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi

Dana Desa Di Kabupaten Aceh Tengah", *Jurnal Hukum RESAM*, Vol. 4, No. 1, April 2018, hlm. 7.

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana. 2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari Buku, Jurnal dan surat kabar.⁸

Teknik Pengumpulan Data penelitian ini adalah dengan melakukan 1) Observasi, yaitu teknik mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian, yaitu di Kabupaten Kampar. 2) Wawancara, yaitu teknik mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan terstruktur mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa pada responden, mulai dari Polisi, Jaksa dan Hakim. 3) Studi kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, (Jakarta: 2011), hlm. 141.

⁹ Nani Widya Sari, "Kewenangan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

C. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kampar

Penegakan hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan hukum, sedangkan pembangunan hukum itu sendiri adalah komponen integral dari pembangunan nasional.⁹ Penegakan hukum bertujuan agar terwujud rasa keadilan dalam masyarakat. Tanpa adanya penegakan hukum suatu Negara akan kacau, keos dan bisa menuju kehancuran. Dengan demikian hukum begitu penting untuk ditegakkan bagi siapa saja, terutama oleh pelaksana penegak hukum itu sendiri, seperti polisi, kejaksaan pengadilan dan lembaga pemasyarakatan serta institusi Negara lainnya. Salah satu penegakan hukum yang harus dan mendesak untuk ditegakkan adalah persoalan korupsi, khususnya korupsi dana desa.

Optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan jawaban tepat dalam menyikapi maraknya perilaku korupsi dan korupsi. Keberhasilan pemberantasan korupsi membawa dampak positif yang meluas bagi rakyat, bangsa dan negara. Mengapa demikian? Karena korupsi

Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017.

menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutkan dengan keuangan. Korupsi juga memberikan ancaman yang **serius** terhadap stabilitas dan keamanan yang dapat melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan (suistanable development) dan penegakan supremasi hukum.¹⁰

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat dua (2) hal penting yang harus dipahami, yang pertama tentang hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi, dan yang kedua tentang lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangannya. Pemahaman ini dipandang perlu karena dalam kedua hal ini akan dijumpai kekhususan-kekhususan pengaturan tentang tindak pidana korupsi itu sendiri maupun Hukum Acara Pidananya.¹¹ Hukum acara Pidana yang dipergunakan dalam penanganan tindak pidana korupsi, selain diatur dalam KUHAP juga diatur dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sementara dilihat dari aspek kelembagaan yaitu Lembaga Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan yang mengadili selain sebagaimana diatur dalam KUHAP juga daiatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangannya memiliki kekhususan¹² yaitu: Lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi ada 3 (tiga) yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Dalam hal penyidikan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, maka prosedur penanganan perkaranya sama dengan prosedur penanganan tindak pidana pada umumnya, yaitu berkas hasil Penyidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan sesuai dengan daerah hukumnya. Apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat

¹⁰ Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No.2, Desember 2014, hlm 169-182.

¹¹ Yudi Kristiana, *Tehnik Penyidikan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), hlm. 5.

¹² *Ibid*, hlm. 16-18

formil dan material, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Penyidik KPK, maka penyidik KPK akan menyerahkan berkas perkara hasil Penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang ada di KPK dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam hal penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan, maka berkas perkara hasil penyidikan akan diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Lembaga yang berwenang melakukan penuntutan tindak pidana korupsi ada tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mekanisme sebagai berikut: 1) terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik KPK, maka penuntutannya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ditugaskan di KPK; 2) terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik kepolisian maupun penyidik Kejaksaan, maka penuntutannya tetap dilakukan oleh Jaksa penuntut Umum yang ada di Kejaksaan. Dengan demikian diluar penyidikan yang dilakukan oleh KPK, maka penuntutannya tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan, sedangkan hasil penyidikan penyidik KPK Penuntutannya dilakukan oleh Jaksa

Penuntut Umum, artinya sekalipun di KPK, penuntutan harus tetap dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Lembaga yang berwenang dalam menyidangkan perkara korupsi ialah Pengadilan. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka persidangan perkara tindak pidana korupsi harus disidangkan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan daerah hukumnya. Dengan demikian jelas kiranya bahwa penanganan perkara korupsi baik yang dilakukan oleh Kejaksaan maupun KPK maka persidangannya harus tetap dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa berdasarkan tabel 1.1, dapat kita lihat bahwa jumlah korupsi dana desa di Kabupaten Kampar ada 3 kasus dengan 3 Tersangka, dengan nilai kerugian keuangan Negara yang berbeda-beda. Dimana pada daerah tersebut memang benar ditemukan adanya kasus korupsi dana desa. dalam penegakan hukumnya juga ditemukan beberapa perbedaan sesuai dengan motif masing-masing kasus tersebut.

2. Penegakan Hukum oleh Kepolisian Resor Kampar

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Zikri dan Bapak Bripka Edo Herli S.E., M.M. selaku Penyidik di Polres Kampar menyatakan

bahwa ada dua kasus tindak pidana korupsi dana desa yang ditangani yaitu Kasus Iskandar dan Zul Anizal. Untuk mengantisipasi agar tindak pidana korupsi dana desa tidak terus berkembang khususnya di Kampar, sangatlah tergantung bagaimana pelaksanaan dari Penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pada umumnya pelaksanaan penegakan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu yang bersifat *preventif* dan *represif*. Penegakan hukum secara preventif yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan. Penegakan hukum secara *represif* adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Namun, dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kampar bersifat *refresif*, yaitu penegakan hukum yang dilakukan dengan cara menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Wilayah Hukum Polisi Resor Kampar dilakukan berdasarkan Standar Operasional Penanganan Pada Unit Reserse Kriminal Khusus di Polres Kampar berbeda dengan tindak pidana lainnya, jika tindak pidana korupsi dana desamemiliki kekhususan SOP dalam penegakan hukumnya. Ada beberapa kekhususan SOP yang dilakukan Unit Reskrimsus dibandingkan dengan penanganan tindak pidana biasa di Reskrim Polres Kampar, hal tersebut dapat terdiri dari :¹³ (1) Laporan dari Masyarakat, Ketika Penyelidik mendapatkan informasi awal tentang dugaan tindak pidana korupsi dana desa, baik berupa laporan yang bersifat tertulis maupun lisan baik dilakukan oleh orang perorangan, lembaga atau kementerian, LSM dll, maka laporan tersebut ditelaah secara seksama dengan data yang tersedia kemudian diikuti dengan upaya menggali

¹³ Wawancara dengan Muhammad Zikri dan Bripka Edo Herli, S.E., M.M., selaku Penyidik

Polres Kampar, tanggal 5 Juni 2019, pukul 10.00WIB., di Kantor Polres Kampar.

informasi tambahan dengan memanfaatkan teknologi informasi misalnya dengan memanfaatkan data public dari internet. Dalam penelitian ini, Pihak Kepolisian sudah menerima laporan dari masyarakat. Seperti pada kasus Iskandar. Adanya laporan masyarakat dari 4 desa yaitu Desa Kampung Panjang, Desa Sungai Jalau, Desa Muara Jalai dan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. (2) Penyelidikan, Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi Penyelidikan merupakan tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. (3) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi memerlukan bantuan dari lembaga yang memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan Negara seperti BPK, BPKP, dan Inspektorat Kabupaten. Oleh sebab itu koordinasi dengan lembaga tersebut menjadi penting untuk dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan Negara. Dalam penelitian ini, pada saat dilakukan Penyelidikan Kepolisian meminta kepada

BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara. Seperti pada kasus Iskandar, setelah diaudit oleh BPKP ditemukan adanya kerugian keuangan Negara senilai Rp. 274.959.700. Karena pada kasus Iskandar terdapat 4 desa yang dikorupsikan, maka BPKP Provinsi Riau melakukan auditor ke 4 desa tersebut, sehingga diperoleh adanya kerugian keuangan Negara senilai Rp. 274.959.700. Selain menggunakan auditor dari BPKP, juga menggunakan auditor dari Inspektorat Kabupaten. Misalnya pada kasus Korupsi dana Desa di Tapung Hilir. Dari temuan auditor tersebut, ditemukan kerugian Negara senilai Rp. 90.000.000,00. (4) Penyidikan, Pasal 1 Angka 2 KUHAP menyebutkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi penyidikan lebih pada mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam penelitian ini, pada saat Penyidikan dilakukan biasanya terlebih dahulu diadakan Gelar Perkara untuk menentukan Tersangka. (5) Gelar Perkara, Gelar perkara dilakukan pada tahap Penyidikan. Biasanya gelar perkara dilakukan untuk menentukan siapa

tersangkanya juga untuk menghitung kerugian keuangan Negara. Dalam penelitian ini, seperti pada kasus korupsi dana desa di Bencah Kelubi Kecamatan Tapung, tersangkanya adalah Zul Anizal, namun tersangkanya melarikan diri sehingga proses penegakan hukumnya masih pada tahap Penyidikan. Selain menentukan tersangkanya, gelar perkara juga dilakukan untuk menghitung kerugian keuangan Negara. Pada proses perhitungan keuangan Negara ditemukan perbedaan persepsi antara Auditor dari Inspektorat Kabupaten Kampar dengan Auditor dari BPKP Provinsi Riau. Polres Kampar menggunakan auditor dari Inspektorat Kabupaten sedangkan Kejaksaan Kampar menggunakan Auditor dari BPKP Provinsi Riau. Sehingga menyebabkan perbedaan dalam perhitungan kerugian keuangan Negara. Dan akhirnya Polres Kampar melakukan gelar perkara dengan Polda Riau, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Bangkinang, Mabes Polri dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Sehingga dari gelar perkara tersebut disepakati bahwa Auditor yang digunakan adalah auditor dari Inspektorat Kabupaten Kampar. (6) Mengumpulkan Alat Bukti, Sejalan dengan esensi dasar penyidikan adalah mengumpulkan alat bukti, sementara jenis alat bukti menurut KUHAP terdiri dari keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, dan keterangan tersangka,

maka kegiatan pengumpulan alat bukti juga dilakukan dengan berdasarkan pada jenis alat bukti tersebut. Pemanggilan terhadap pihak-pihak yang akan dimintai keterangan sebagai saksi sudah harus disebutkan dalam daftar rencana penyidikan. Dalam kasus Iskandar, saksi yang dipanggil berjumlah 28 orang guna dimintai keterangan. (7) Pemeriksaan Tersangka. (8) Penahanan Tersangka, Tindakan penahanan oleh Penyidik harus disertai dengan surat perintah penahanan dan dibuatkan berita acara penahanan.

3. Penegakan Hukum oleh Kejaksaan Negeri Bangkinang

Lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi ada 3 (tiga) yaitu kepolisian, kejaksaan dan KPK. Dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian, maka prosedur penanganan perkaranya sama dengan prosedur penanganan tindak pidana pada umumnya, yaitu berkas hasil penyidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan sesuai dengan daerah hukumnya. Dalam hal penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik kejaksaan, maka berkas perkara hasil penyidikan akan diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Khusus di Kabupaten Kampar, sejak awal penanganan

perkara tindak pidana korupsi dana desa tidak hanya ditangani oleh Polres Kampar namun ada yang langsung ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bangkinang tanpa terlebih dahulu dari Polres Kampar. Hal demikian sudah lumrah terjadi, oleh karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, yang penanganannya berbeda dengan tindak pidana umum. Jadi, untuk perkara tindak pidana korupsi penanganannya tidak harus dimulai dari lembaga Kepolisian, namun bisa langsung oleh Kejaksaan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Pujo, SH dan Bapak Amri Rahmanto, SH ada dua kasus korupsi dana desa yang pernah ditangani. Yaitu kasus Iskandar (lanjutan dari Polres Kampar), dan kasus Suhailis Chan (berdasarkan temuan Intelijen Kejaksaan Kampar). Dimana motif kedua kasus tersebut berbeda. Untuk kasus Iskandar, korupsi tersebut terjadi pada tahun 2015. Ketika itu Pelaku selaku Camat Kampar Utara juga menjadi Pejabat Sementara (Pjs) empat kepala desa (kades) yakni, Kampung Panjang, Sungai Jalau, Muara Jalai dan Sei Tonang. Dana yang bersumber dari APBN 2015 untuk empat desa diantaranya diselewengkan. Saat pencairan dana, sebagian dana desa disimpan oleh Iskandar. Selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke dalam rekening pribadinya. Pencairan dana

tersebut untuk kegiatan pembangunan fisik berupa semenisasi jalan dan pembuatan irigasi desa. Namun pengerjaannya tidak melalui mekanisme yang benar. Atas perbuatan Iskandar tersebut ditemukan kerugian Negara sebesar Rp. 274.959.700 Kasus Suhailis Chan, mantan Pejabat Kades Malelo, Kabupaten Kampar melakukan penyelewengan dana desa. Diketahui bahwa tidak hanya dana desa saja, tetapi sumber keuangan Dana Desa secara komprehensif. Diantaranya dana PAD (Pendapatan Asli Desa), Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), dan bagi hasil, Atas perbuatan Suhailis Chan tersebut ditemukan kerugian Negara sebesar Rp. 335.963.575.70.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kejaksaan Negeri Kampar dilakukan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 017/ A/ JA/ 07/ 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, Standar Operasional Prosedur untuk menangani tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :¹⁴ (1) Pra Penyelidikan. (2) Penyelidikan ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa

¹⁴ Wawancara penulis dengan Pujo, S.H. dan Amri Rahmanto, S.H, selaku penyidik Kejaksaan

Negeri Bangkinang, tanggal 5 Juni 2019, pukul 13.00., di Kantor Kejaksaan Negeri Bangkinang.

yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. (3) Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (4) Penuntutan; Berdasarkan wawancara, Penuntutan tindak pidana korupsi berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE- 003/ A /JA / 02010 tentang Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi. (5) Upaya Hukum dan Eksekusi yaitu: Jaksa menjalankan perintah putusan Pengadilan. Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya''. Eksekusi putusan Pengadilan baru dapat dilakukan oleh Jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari Panitera.

4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru

Setelah tahap Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian dan Kejaksaan dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah Tahap Penuntutan. Tahap Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Tahap ini sebagai tahap akhir dalam penyelesaian hukum perkara pidana. Dalam kasus tindak pidana korupsi dana desa yang terjadi di Provinsi Riau, maka pengadilan tindak pidana korupsi yang dimiliki di Riau hanya ada di Kota Pekanbaru. Untuk itu kasus ini di tangani dan di adili di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memiliki pengadilan tindak pidana korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Riau yang berkedudukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili untuk seluruh perkara korupsi yang ada di Provinsi Riau. Berdasarkan temuan Penulis di Pengadilan Negeri Pekanbaru diperoleh bahwa setiap perkara korupsi dana desa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah bervariasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Putusan Pengadilan Kasus Korupsi Dana Desa di Pengadilan Negeri Tindak Pidana
Korupsi Pekanbaru

No	Nomor Perkara	Pelaku	Sumber Korupsi	Tuntutan Jaksa	Putusan Akhir	Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
1	30/Pid.Sus - TPK//2018/PN Pbr	Drs. ISKANDAR, M.Si (Camat Kampar Utara dan pejabat Sementara Kepala Desa di 4 Desa)	Dana Desa (DD)	Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Pidana Penjara 2 tahun Pidana denda 50.000.000 Membayar uang Pengganti sebesar 274.959.700. jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun	Pidana penjara 1 tahun 6 bulan Pidana denda 50.000.000 Membyar uang Pengganti sebesar 274.959.700 .	274.959.700 sudah dibayar keseluruhannya

2	No. 36/Pid.Sus - TPK/2018 /PN Pbr	Suhailis Chan(ASN) Pejabat Kepala Desa Gunung Malelo Ke Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar	DD ADD SILPA bantuan Provinsi -Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Pasal 2 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP Pidana Penjara 5 tahun dan 6 bulan Pidana denda 200.000.0 00 Membaya r uang Pengganti sebesar 261.058.5 51,72, jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 9 bulan.	Pidana Penjara 4 tahun Pidana denda 200.000.000 Subsider penjara 6 bulan Subsider kurungan 1 bulan Uang pengganti (Subsider Denda) 261.058.551 ,00	Tidak Ada
---	---	---	--	---	---	-----------

Sumber: Data Olahan dari Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru Tahun 2019

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat bahwa Putusan Hakim dalam perkara korupsi dana desa berbeda-beda. Ada yang putusannya 4 tahun penjara, 2 tahun bahkan 1 tahun. Hal demikian disebabkan Oleh karena beberapa terpidana kasus korupsi dana desa tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara. Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yaitu berbentuk pembayaran uang pengganti.

5. Hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kampar

Berdasarkan pembahasan di atas, diketahui bahwa di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kampar belum berjalan maksimal karena masih terdapat beberapa hambatan. Sesuai dengan teori penegakan hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mengakibatkan penegakan hukum tersebut tidak bisa

berjalan maksimal. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, aktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Adapun hambatan-hambatan penegak hukum baik itu Kepolisian Resor Kampar dan Kejaksaan Negeri Bangkinang dalam menangani kasus tindak pidana korupsi dana desa di kabupaten Kampar ini yaitu:

a. Perbedaan Persepsi penegak hukum dalam menghitung kerugian keuangan Negara

Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara.¹⁵ Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang saat ini berlaku tidak mendefinisikan serta mengatur secara tegas dan pasti mengenai apa yang dimaksud dengan kerugian negara. Definisi kerugian negara diatur dalam peraturan yang lain seperti Undang-Undang Pembendaharaan Negara dan Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat 22 menjelaskan “Kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan

¹⁵ Ihsanuddin, *Kasus Korupsi Dana..... Loc. Cit*, hlm 21.

unsur-unsur dari kerugian negara yaitu: 1) Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan atau nilai yang seharusnya; 2) Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian; 3) Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana di kemukakan di atas, dapat dilihat bahwa konsep yang dianut adalah konsep kerugian negara dalam arti delik materiil.

Suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata. Hal ini berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang menjelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 1

angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menjelaskan kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Selain menurut UU BPK, BPKP menilai bahwa dalam kerugian keuangan/ kekayaan negara, suatu kerugian negara tidak hanya yang bersifat riil, tetapi juga yang bersifat potensial yaitu yang belum terjadi seperti adanya pendapatan negara yang akan diterima.¹⁶

Undang-Undang Tipikor khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai siapa instansi atau pihak mana yang berwenang dalam menentukan perhitungan kerugian Negara. Di dalam praktik, institusi yang seringkali dilibatkan oleh penegak hukum dalam menghitung kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).¹⁷ Diluar kedua institusi tersebut misalkan penghitungan kerugian Negara juga dapat dilakukan oleh akuntan publik. Bahkan dalam beberapa perkara Pihak Kejaksaan dan Pengadilan pernah melakukan sendiri penghitungan kerugian

¹⁶ ihsanuddin, *Kasus Korupsi Dana..... Loc. Cit*, hlm 24-25

¹⁷ Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya dan Henny Juliani, "Kajian Yuridis Penerapan Unsur

Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2017, hlm. 13.

keuangan Negara. Selain BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga berwenang untuk menetapkan mengenai adanya kerugian Negara. Ini terkait dengan fungsi BPKP yaitu melaksanakan pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan. Kewenangan Badan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 yang menyatakan BPKP memiliki kewenangan menghitung kerugian Negara.

Bahwa berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Zikri, Selaku Penyidik di Kepolisian Kampar, ada perbedaan persepsi antara kepolisian dengan kejaksan bangkinang dalam menentukan kerugian keuangan Negara. Oleh kepolisian menggunakan auditor dari Inspektorat Kabupaten Kampar, sedangkan oleh Kejaksan bangkinang menggunakan auditor dari BPKP Provinsi Riau. Sehingga hal ini menyebabkan terkendalanya penegakan hukum itu sendiri.

b. Tersangka Kabur

Dalam hal penyidik menetapkan status tersangka kepada seseorang biasanya telah memiliki bukti-bukti yang cukup sesuai Pasal 183 KUHP yakni minimal dua alat bukti saja sudah bisa diajukan ke sidang pengadilan untuk memperoleh satu

bukti lagi yakni keyakinan hakim (vide: teori pembuktian negatif).¹⁸ Bahwa dari hasil wawancara dengan bapak Muhammada Zikri Penyidik Polres Kampar, ditemukan kendala dalam penegakan hukumnya yaitu, dimana Tersangka kasus korupsi dana desa Tapung Hilir/ Gerbang sari kabur. Sehingga menghambat penegakan hukum itu sendiri. Bahwa proses penegakan hukum nya saat ini masih pada tahap Penyidikan. Adapun kerugian keuangan Negara akibat perbuatan tersangka adalah senilai Rp. 965.626.826.

c. Sulitnya Menghadirkan Saksi

Bahwa penegakan hukum oleh Kejaksan Negeri Bangkinang ditemukan kendala dalam penegakan hukumnya, yaitu dimana sulitnya menghadirkan saksi, baik ditingkat penyidikan maupun dipengadilan. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP. Saksi adalah orang orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi. Berdasarkan hasil

¹⁸ Gomgoman Simbolon Madiasa Albisar, Mahmud Mulyadi dan Jelly Leviza, "Analisis Hukum Atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Kaitan Dengan Wewenang Lembaga Peradilan (Studi Kasus: Perkara Peradilan

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel.), *USU Law Journal*, Vol. 4, No. 2, Maret 2016., hlm. 158.

wawancara dengan kejaksaan bangkinang, bahwa sulitnya menghadirkan saksi ketika di tingkat penyidikan dan peradilan. Hal ini disebabkan oleh karena saksi yang dihadirkan berasal dari desa. Oleh karena kasusnya adalah korupsi dana desa, sehingga saksi yang dihadirkan haruslah dari desa itu sendiri. Seperti pada Kasus Korupsi di Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu, dan Desa Kampung Panjang, Desa Sungai Jalau kecamatan Kampar. Untuk di tingkat penyidikan, keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti untuk membuat terang terjadinya peristiwa pidana. Namun pada kenyataannya, untuk menghadirkan saksi di kejaksaan bangkinang tidaklah mudah. Karena lokasi desa yang cukup jauh dari pusat kota. Juga ketika di pengadilan, untuk kepentingan pembuktian, saksi harus dapat menyesuaikan dengan waktu/jadwal persidangan. Sehingga hal ini agak menyulitkan kejaksaan bangkinang karena harus menghadirkan kembali saksi-saksi yang sebelumnya sudah dimintai keterangan pada waktu penyidikan.

d. Terpidana tidak memiliki harta untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara

Bahwa kewenangan kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 017/ A/ JA/ 07/ 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PERJA-

039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, kewenangannya adalah Pra Penyelidikan, Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Upaya Hukum dan Eksekusi. Setelah perkara korupsi dana desa diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, maka kejaksaan sesuai kewenangannya untuk melakukan upaya hukum dan Eksekusi. Untuk kasus korupsi dana desa di kabupaten Kampar, ada dua kasus yang sudah inkraht yaitu: 1) kasus Drs. ISKANDAR, M.Si (Camat Kampar Utara dan pejabat Sementara Kepala Desa di 4 Desa) putusannya Pidana penjara 1 tahun 6 bulan Pidana denda 50.000.000, pidana tambahan Membayar uang Pengganti sebesar 274.959.700. Untuk Uang Pengganti kerugian keuangan Negara seluruhnya sudah dibayar oleh Terdakwa senilai 274.959.700; 2) kasus Suhailis Chan (ASN) Pejabat Kepala Desa Gunung Malelo Ke Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar) putusannya Pidana Penjara 4 tahun Pidana denda 200.000.000 Subsider penjara 6 bulan Subsider kurungan 1 bulan, pidana tambahan Uang pengganti (Subsider Denda) 261.058.551,00. Namun uang pengganti kerugian keuangan Negara tidak ada dibayar sama sekali oleh Terdakwa. Sehingga hal ini lah yang menyulitkan kejaksaan untuk melakukan Eksekusi.

Oleh karena terpidana kasus korupsi dana desa tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara, maka mempengaruhi putusan di Pengadilan. Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yaitu berbentuk pembayaran uang pengganti. Salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah adanya kerugian keuangan Negara. Unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan Negara akibat korupsi, sebagaimana ditegaskan dalam Konsiderans dan Penjelasan Umum Undang-Undang No 31 Tahun 1999. Oleh Undang-Undang, instrument untuk memulihkan keuangan Negara tersebut dimasukkan dalam pidana tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti.

Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi yang telah berkekuatan hukum

tetap dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Peran Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai eksekutor. Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi diatur dalam Bab XIX Pasal 270 sampai Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Menurut ketentuan pasal 270 KUHP bahwa ‘‘ Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya’’. Eksekusi putusan Pengadilan baru dapat dilakukan oleh Jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari Panitera.¹⁹

Perampasan harta korupsi untuk Negara ini timbul akibat putusan hakim, dan pelaksanaannya merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Fungsi utama Kejaksaan dalam peradilan pidana adalah sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa Jaksa adalah ‘‘ Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak

¹⁹ Mohammad Ginanjar, Dahlan Ali dan Mahfud, ‘‘Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan

Tinggi Aceh’’, *Jurnal Kanun Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2, Agustus 2016, hlm. 332.

sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain yang berdasarkan undang-undang.

Pasal 18 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi mengatur bahwa : (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c) Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d) Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

6. Upaya Penegak Hukum dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kampar

a. Melakukan Gelar Perkara

Gelar perkara dilakukan pada tahap Penyidikan. Biasanya gelar perkara dilakukan untuk menentukan siapa tersangkanya juga untuk menghitung kerugian keuangan Negara. Dalam penelitian ini, seperti pada kasus korupsi dana desa di Bencah Kelubi Kecamatan Tapung, tersangkanya adalah Zul Anizal, namun tersangkanya melarikan diri sehingga proses penegakan hukumnya masih pada tahap Penyidikan. Selain menentukan tersangkanya, gelar perkara

juga dilakukan untuk menghitung kerugian keuangan Negara. Pada proses perhitungan keuangan Negara ditemukan perbedaan persepsi antara Auditor dari Inspektorat Kabupaten Kampar dengan Auditor dari BPKP Provinsi Riau. Polres Kampar menggunakan auditor dari Inspektorat Kabupaten sedangkan Kejaksaan Bangkinang menggunakan Auditor dari BPKP Provinsi Riau. Sehingga menyebabkan perbedaan dalam perhitungan kerugian keuangan Negara. Bahwa untuk mengatasi perbedaan persepsi Polres Kampar dengan Kejaksaan bangkinang dalam menentukan kerugian keuangan Negara, maka dilakukan gelar perkara dengan melibatkan Polda Riau, Polres Kampar, Mabes Polri, BPKP Provinsi Riau, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Bangkinang. Sehingga dari gelar perkara tersebut disepakati bahwa Auditor yang digunakan adalah auditor dari Inspektorat Kabupaten Kampar.

b. Melakukan DPO (Daftar Pencarian Orang) terhadap Tersangka

Bahwa terhadap Tersangka Zul Anizal yang melarikan diri, oleh Kepolisian Kampar dilakukan DPO. Ditingkat Penyidikan keputusan untuk mengumumkan status DPO haruslah mengacu pada pengetahuan sesuai hukum. Status buron yang disebutkan kepada

seseorang karena berdasarkan berbagai alat bukti yang ada disimpulkan bahwa ketersangkaan sudah dapat ditetapkan dan dalam proses penyidikan selanjutnya berdasarkan berbagai syarat administrative kepenyidikan telah ditempuh, dan seseorang yang dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana sudah dipanggil secara patut namun yang dipanggil tanpa alasan yang sah tidak memenuhi panggilan pihak penyidik maka dibuatkan daftar pencarian orang/DPO agar yang bersangkutan sedang dalam pencarian, dapat ditangkap dimanapun berada.

c. Asettracing (Penelusuran Aset)

Bahwa terhadap terpidana kasus korupsi dana desa yang sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Wajib untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara. Kasus Suhailis Chan (ASN) Pejabat Kepala Desa Gunung Malelo Ke Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar) putusannya Pidana Penjara 4 tahun Pidana denda 200.000.000 Subsider penjara 6 bulan Subsider kurungan 1 bulan, pidana tambahan Uang pengganti (Subsider Denda) 261.058.551,00. Namun uang pengganti kerugian keuangan Negara tidak ada dibayar sama sekali oleh Terdakwa. Sehingga hal ini lah yang menyulitkan kejaksaan untuk melakukan Eksekusi. Pihak Kejaksaann Bangkinang melakukan Penelusuran aset terhadap harta kekayaan terpidana, guna untuk mengembalikan

kerugian keuangan Negara. Namun faktanya, setelah dilakukan penelusuran asset ternyata terpidana tidak ada sama sekali mengembalikan kerugian keuangan Negara. Hal inilah yang akhirnya memberatkan hukuman bagi Terpidana.

D. PENUTUP

Penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan masih bersifat represif, yaitu penegakan hukum yang dilakukan dengan cara menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Adapun tindakan yang dilakukan penegak hukum ialah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu dimulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Eksekusi. Hambatan yang dihadapi dalam Penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kampar disebabkan: Perbedaan persepsi penegak hukum dalam menghitung kerugian keuangan Negara, Tersangka Kbur, Sulitnya menghadirkan saksi, Terpidana tidak memiliki harta untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara. Upaya yang harus ditempuh oleh Penegak hukum dalam Penegakan hukum tindak

pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kampar adalah melakukan Gelar perkara, dilakukan DPO (Daftar Pencarian Orang) terhadap Tersangka, Penelusuran Aset (*Assettracing*).

Kepada aparat penegak hukum di Kabupaten Kampar, kedepannya penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa tidak hanya dilakukan secara represif, namun harus bertindak secara preventif dan pre emtif. Juga kepada setiap Kepala Desa di masing-masing daerah untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan dana desa agar tidak terjadi korupsi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Djanggih, Bunga; Marten; Aan Aswari; Hardianto, 'Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi', *Jurnal Holrev Faculty of Law*, 2.2 (2018)
- 'Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Diponegoro', *Law Journal*, 6.1 (2017)
- Kristiana, Yudi, *Tehnik Penyidikan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Thafa Media Yogyakarta, 2018)
- Leviza, Gomgoman Simbolon Madiasa Albisar; Mahmud Mulyadi; Jelly, 'Analisis Hukum Atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Kaitan Dengan Wewenang Lembaga Peradilan (Studi Kasus: Perkara Peradilan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel.)', *USU Law Journal*, 4.2 (2016)

- Mahfud, Mohammad Ginanjar; Dahlan Ali;, 'Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh', *Jurnal Kanun Ilmu Hukum*, 18.2 (2016)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Rahman, Fathur, 'Korupsi Di Tingkat Desa', *Jurnal Governance*, 2.1 (2011), 16
- Sari, Nani Widya, 'Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia', *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 4.2 (2017)
- Surya, Achmad, 'Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Aceh Tengah', *Jurnal Hukum RESAM*, 4.1 (2018)
- Waluyo, Bambang, 'Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Jurnal Yuridis', *Jurnal Yuridis*, 1.2 (2014)
- Winarni, Endah Dwi, 'Pertanggungjawaban Dalam Pengelolaan Dana Desas Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)', *Jurnal Daulat Hukum*, 1.1 (2018)

Magister Ilmu Hukum
Universitas Lancang Kuning
Jl. Yos Sudarso Km. 8 Umban Sari, Rumbai, Pekanbaru-Riau
<http://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/index>

e-ISSN: 2714-8688

9 772714 868016